

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan daerah ini terkait dengan pengelolaan APBD. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan suatu daerah yang dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan serta sebagai alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Anggaran daerah juga sebagai alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang, ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja. Selain itu, anggaran daerah juga harus memuat kinerja keuangan, untuk digunakan sebagai penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan. Pengukuran kinerja keuangan penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan dalam bentuk laporan keuangan dengan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, kinerja keuangan pemerintah daerah serta pelaporan atas sumber daya yang dikelola pemerintah.

Penerapan Pengelolaan Keuangan Daerah sejalan dengan teori *stewardship*. Teori *Stewardship* merupakan suatu situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar sosiologi dan psikologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* (manajemen/pemerintah) termotivasi untuk

bertindak sesuai keinginan *principals* (masyarakat). Hubungan antara *principals* dengan *stewards* didasari dengan kepercayaan, kolektif sesuai dengan tujuan organisasi. *Stewardship theory* merupakan model yang dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik sehingga eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, dapat menampung aspirasi masyarakat, dan mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi dapat terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

Untuk mengetahui atau mengukur baik buruknya kinerja keuangan suatu anggaran pemerintah daerah (organisasi sektor publik) tidak semudah dibandingkan dengan mengukur organisasi bisnis (organisasi yang berorientasi laba). Organisasi sektor bisnis dalam mengukur kinerjanya bisa dengan melihat tingkat labanya sedangkan organisasi sektor publik lebih sulit karena dibutuhkan lebih dari satu variabel untuk mengukurnya. Menurut Mardiasmo (2002) kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama.

Salah satu indikator keberhasilan kinerja keuangan adalah keberhasilan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Menurut Boediono (1998) pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan *output* per kapita, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian mampu menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam suatu periode tertentu (Sukirno, 2006). Pertumbuhan ekonomi yang stabil diharapkan akan mengurangi tingkat kemiskinan. Kemiskinan itu sendiri adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Cara pengukuran tingkat kemiskinan dari BPS dengan menghitung jumlah orang miskin sebagai proporsi dari populasi. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan

pemerataan pendapatan akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan.

Pada tahun 2020 dunia dihadapkan oleh Covid-19, termasuk Indonesia sehingga banyak sektor yang berdampak akibat Covid-19. Ekonomi di Indonesia pada tahun tersebut diperkirakan tumbuh negatif, angka kemiskinan meningkat. Berdasarkan perhitungan *year on year* pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya mencapai 2,97% dibandingkan capaian triwulan pertama tahun 2019 yang sebesar 5,07%. Data pada triwulan kedua juga kurang bersahabat dengan menunjukkan kemunduran yang dalam sebesar -5,32%, terburuk sejak tahun 1999. Data pada triwulan ketiga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49%, sedangkan pada triwulan keempat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dampak yang terlihat dari adanya Covid-19 tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi turut mempengaruhi perekonomian diberbagai negara. Bahkan saat itu perekonomian dunia mengalami tekanan berat yang diakibatkan oleh virus tersebut. Perekonomian dunia pada negara-negara tertentu seperti Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Hongkong, Uni Eropa, Singapura, dan beberapa negara lain mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada triwulan I dan II di tahun 2020. Bagi Indonesia pandemi Covid-19 menimbulkan efek negatif dari kesehatan ke masalah sosial dan berlanjut ke ekonomi.

Pandemi Covid-19 juga membuat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami kontraksi sebesar minus 2,65%. Ditambah lagi kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan domestik. Penghasilan masyarakat yang menurun karena pandemi menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya atau tutup total. Angka kemiskinan pun meningkat di seluruh Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

Sebagai penanggulangan dampak dari pandemi Covid-19 yang tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), pemerintah

daerah melakukan *Refocusing* Anggaran yang lebih digunakan untuk mendanai:

1. Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19;
2. Penyediaan jaring pengaman sosial/*Social Safety Net*; dan
3. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup.

Dari kejadian pandemi Covid-19, Peran Pemerintah melalui APBD menjadi sangat penting dengan tujuan kemandirian, efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan dengan cara *Refocusing* Kegiatan atau Realokasi Anggaran dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan membuat analisis rasio-rasio keuangan yang mengacu pada APBD pada tahun anggaran tertentu. Rasio-rasio keuangan ini selanjutnya dibandingkan antar tahun untuk melihat kemajuan yang dicapai pemerintah daerah. Menurut Shandy (2012) Beberapa rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain pertama Rasio Kemandirian yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, kedua Rasio Efektivitas yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, ketiga Rasio Efisiensi yaitu perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima, keempat Rasio Aktivitas yaitu kemampuan pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal, kelima Rasio DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*) yaitu dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selain menggunakan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah dapat menggunakan sumber dana lain yaitu dengan melakukan pinjaman sehingga rasio ini diperlukan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kembali pinjaman daerah, keenam Rasio Pertumbuhan yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya

yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Selanjutnya hasil rasio keuangan yang telah dianalisis tersebut digunakan sebagai Indikator kinerja keuangan daerah untuk mengambil keputusan atau kebijakan dan dijadikan evaluasi sebagai pembanding skema kerja dan pelaksanaan yang akan datang.

Beberapa peneliti yang melakukan penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi, memberikan hasil yang bervariasi. Hasil dari penelitian Bonifasia (2019) dengan judul nya *the effect of budgeting performance on economic growth and its impact on poverty level study on regencies and city in the Province of Papua* dimana analisis kinerja keuangannya menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi. Dari hasil tersebut menjelaskan rasio kemandirian tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua. Sedangkan rasio efisiensi dan efektivitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi dibuktikan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di beberapa kabupaten di Papua tidak mencerminkan bahwa tingkat kemiskinannya menurun yang disebabkan karena sektor-sektor yang digarap pemerintah daerah masih terbatas pada penyediaan sarana dan prasarana fisik yang belum dirasakan dampaknya pada masyarakat dalam jangka pendek sehingga belum mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dan tingkat kesejahteraannya, karena sebagian besar program yang ada belum seluruhnya dapat menyentuh masyarakat yang ada di pelosok-pelosok (pedalaman) yang jauh dari jangkauan pemerintah karena letak geografisnya dan medan yang sangat sulit.

Tak sejalan dengan Bonifasia (2019), pada penelitian terdahulu oleh Hamzah (2008) dan Shandy (2012) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap jumlah kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka jumlah kemiskinan akan semakin rendah, bisa juga diartikan peningkatan pendapatan per kapita mendorong perlambatan laju pertumbuhan kemiskinan, sebaliknya ketidakmerataan pendapatan akan meningkatkan laju pertumbuhan penduduk miskin. Ketimpangan pendapatan mempercepat laju pertumbuhan

kemiskinan, ini dapat dilihat dari pangsa pendapatan perkotaan yang berpengaruh positif terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin.

Syamsudin (2015) tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan di Karisidenan Solo menyatakan rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efisiensi dan efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga menghasilkan riset bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan dan pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi masih bertambah pula tingkat pengangguran. Dari data yang diperoleh peneliti, pemerintah daerah Kota Surakarta dan sekitarnya menunjukkan peningkatan yang cukup baik, hal ini mungkin disebabkan oleh melonjaknya konsumsi pada kawasan solo raya dan minat investasi yang kuat. Tetapi ternyata peningkatan pendapatan tersebut tidak dirasakan oleh para masyarakat miskin.

Berdasarkan hasil pengujian Subhan (2015), kinerja keuangan daerah yang terdiri dari indikator rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio ruang fiskal, rasio keserasian dan indeks kapasitas fiskal berpengaruh signifikan negatif terhadap pengangguran. Hal ini mencerminkan bahwa, peningkatan kinerja keuangan daerah yang ditunjukkan dari peningkatan indikator rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio ruang fiskal, rasio keserasian dan indeks kapasitas fiskal, akan mengurangi jumlah pengangguran. Pengaruh signifikan negatif terjadi pada pengaruh langsung maupun pengaruh total melalui pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, kinerja keuangan daerah yang terdiri dari indikator rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio ruang fiskal, rasio keserasian dan indeks kapasitas fiskal berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan. Hal ini mencerminkan bahwa peningkatan kinerja keuangan daerah yang ditunjukkan dari peningkatan indikator rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio ruang fiskal, rasio keserasian dan indeks kapasitas fiskal, akan mengurangi jumlah kemiskinan. Pengaruh signifikan negatif terjadi pada pengaruh langsung maupun pengaruh total melalui pertumbuhan ekonomi.

Hasil analisis kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, dan dampaknya terhadap kemiskinan, pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Gini oleh Anisa (2017) menjelaskan bahwa rasio kinerja keuangan semua rasionya yang terdiri dari rasio kemandirian, efisiensi, efektivitas, aktivitas dan pertumbuhan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan Pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil negatif terhadap Kemiskinan, Pengangguran dan Indeks Gini. Sedangkan pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

Dari latar belakang yang sudah peneliti sampaikan diatas, ada banyak penelitian terkait pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, dengan hasil yang berbeda-beda dan ketidakkonsistenan penelitian, sehingga menjadi dasar peneliti menggunakan pendekatan kontijensi dalam penelitian ini. Menurut Govindarajan (2012) menyatakan bahwa untuk mengatasi ketidakkonsistenan hasil-hasil riset tersebut diperlukan pendekatan kontijensi (*contingency*). Berdasarkan teori kontijensi maka ada dugaan bahwa terdapat faktor atau variabel situasional lainnya yang mungkin akan saling berinteraksi didalam mempengaruhi situasi tertentu. Salah satu variabel tersebut adalah variabel *intervening*. Variabel *intervening* adalah variabel yang disebabkan oleh variabel independen dan menyebabkan variabel dependen. Dengan demikian, penelitian ini akan menjelaskan **“Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai *Intervening*”**. Perbedaan lain yang membedakan dari penelitian lainnya adalah dari studi dan waktu penelitian. Dalam penelitian ini, Peneliti berfokus terhadap pemerintah seluruh Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dalam kurun waktu 4 tahun yaitu tahun 2018-2021.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian **“Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai *Intervening*”**, adalah sebagai berikut:

1. Apakah rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah periode tahun 2018-2021?

2. Apakah rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah periode tahun 2018-2021?
3. Apakah rasio efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah periode tahun 2018-2021?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah periode tahun 2018-2021?
5. Apakah rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah periode tahun 2018-2021?
6. Apakah rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah periode tahun 2018-2021?
7. Apakah rasio efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah periode tahun 2018-2021?
8. Apakah rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai *intervening* periode tahun 2018-2021?
9. Apakah rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai *intervening* periode tahun 2018-2021?
10. Apakah rasio efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai *intervening* periode tahun 2018-2021?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai *Intervening*” tujuannya adalah:

1. Menganalisa dan mengetahui pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah periode tahun 2018-2021.
2. Menganalisa dan mengetahui pengaruh rasio efisiensi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah periode tahun 2018-2021.
3. Menganalisa dan mengetahui pengaruh rasio efektivitas pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah periode tahun 2018-2021.

4. Menganalisa dan mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Jawa Tengah periode tahun 2018-2021.
5. Menganalisa dan mengetahui pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah terhadap kemiskinan di Jawa Tengah periode tahun 2018-2021.
6. Menganalisa dan mengetahui pengaruh rasio efisiensi keuangan daerah terhadap kemiskinan di Jawa Tengah periode tahun 2018-2021.
7. Menganalisa dan mengetahui pengaruh rasio efektivitas pendapatan asli daerah terhadap kemiskinan di Jawa Tengah periode tahun 2018-2021.
8. Menganalisa dan mengetahui pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah terhadap kemiskinan di Jawa Tengah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai *intervening* periode tahun 2018-2021.
9. Menganalisa dan mengetahui pengaruh rasio efisiensi keuangan daerah terhadap kemiskinan di Jawa Tengah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai *intervening* periode tahun 2018-2021.
10. Menganalisa dan mengetahui pengaruh rasio efektivitas pendapatan asli daerah terhadap kemiskinan di Jawa Tengah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai *intervening* periode tahun 2018-2021.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap kemiskinan di Jawa Tengah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai *intervening* adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru dan menjawab ketidakkonsistenan penelitian pengembangan penelitian terkait pengaruh kinerja keuangan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai *intervening* periode tahun 2018-2021.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai *intervening* periode tahun 2018-2021.
- b. Bagi pemerintah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pengambilan keputusan atau kebijakan dalam menentukan pengaruh

kinerja keuangan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai *intervening* periode tahun 2018-2021.

- c. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan dapat menambah referensi, serta sumber penelitian selanjutnya, khususnya menggunakan pendekatan kontijensi terkait pengaruh kinerja keuangan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai *intervening*.

## **E. Sistematika Penulisan**

Dalam memudahkan pemahaman dan mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai penelitian ini, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah yang mendasari dilakukannya penelitian ini. Rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan penelitian, tujuan penelitian merupakan hal yang ingin dilakukan dan hasil yang dicapai melalui penelitian ini serta sistematika penulisan mencakup ringkasan pembahasan materi setiap bab.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Telaah pustaka berisi landasan teori yang menjabarkan teori sebagai acuan dasar yang mendukung penelitian ini. Penelitian terdahulu merupakan dasar penyusunan penelitian ini, yang kegunaannya untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Kerangka berpikir memuat dasar pemikiran peneliti dalam memecahkan akar masalah penelitian dilengkapi dengan bagan alir penelitian, yang memuat arti penting/masalah yang teridentifikasi, akar masalah, alternatif pemecahan masalah, metode penelitian/pendekatan sebagai solusi masalah, dan hasil penelitian. Hipotesis berisi tentang pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori tentang jawaban sementara terhadap suatu masalah dan masih harus dibuktikan kebenarannya.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Menjelaskan mengenai jenis penelitian, tentang jenis penelitian yang digunakan, data dan sumber data, metode pengumpulan data, cara yang dilakukan untuk memperoleh data, desain pengambilan sampel berisi teknik pengambilan sampel dan metode analisis data.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi mengenai gambaran umum penelitian menjelaskan mengenai kriteria dan sampel apa yang akan digunakan, analisis data, cara pengolahan data menjadi informasi yang mudah dipahami, dan pembahasan berisi mengenai pemaparan apa saja yang telah diteliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.

#### **BAB V : PENUTUP**

Berisi mengenai kesimpulan dari hasil pengujian yang merupakan penjelasan singkat hasil analisis, keterbatasan penelitian yang dialami selama periode penelitian dan pembahasan yang dilakukan, serta saran yang bermanfaat bagi investor dan calon investor serta penelitian yang akan datang.